

Yohana Lupu beti

by UNITRI Press

Submission date: 10-May-2023 10:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1994651190

File name: Yohana_Lupu_beti.docx (161.69K)

Word count: 1210

Character count: 8008

**PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LANDUNGSARI, KECAMATAN DAU,
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



Oleh :

Yohana Lupu Beti

2016120197

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Pemerintah yang ada di desa mendapatkan dan seperti ADD tujuannya yaitu sebagai bentuk dukungan dan juga memberikan dorongan untuk dilakukan kegiatan dengan menggunakan ADD dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan gotong royong sebagai bentuk dilakukan pemberdayaan. Mendeskripsikan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan realisasi pelaksanaan dana ADD adalah tujuan dari penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini penelitian mengambil dana keuangan desa landungsari kecamatan dau, kabupaten malang selama periode 2018 yaitu mengenai proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. (ADD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan mulai dari awal hingga akhir, yaitu penempatan petugas pengelolaan keuangan desa, penyusunan rencana anggaran proses dan perencanaan yang sesuai dengan rencana dari hasil rapat desa, pelaporan penggunaan keuangan dengan panduan serta prosedur yang telah ditentukan perencanaan yang melibatkan masyarakat desa landungsari yang dilakukan musyawarah masyarakat desa landungsari. (MUSREMBANG Desa), dalam proses pelaksanaan anggaran atau kegiatan yang terealisasi dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Keuangan

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan yang terkecil di negara Indonesia adalah desa yang dalam hal ini memiliki koneksi langsung antara pemerintah dari desa dengan masyarakat yang terdapat di desa, sehingga pembangunan desa lebih cepat dikembangkan karena memiliki otonominya sendiri sehingga memiliki peluang untuk mandiri. Melalui sistemnya dalam pemerintahan di desa memiliki peran yang utama karena nantinya akan mendorong pemerintahan daerah dalam pembangunan, melakukan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan dan juga melakukan sistem pembangunan. Melalui itu, telah dimaknai sebagai kerja nyata yang berasal dari pemerintah di daerah setempat karena telah melakukan mandirinya daerah sebagai bentuk pelaksanaan memberi dukungan pada otonomi di wilayah terkait.

Melalui melakukan peningkatan dan juga layanan serta pengelolaan setiap potensi yang tersedia dilakukan dengan tujuan mewujudkan otonomi dari daerah sendiri yang terbilang efektif dan juga efisien. Tujuan paling penting dari diberlakukan otonomi di daerah yaitu melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat yang bersifat publik dan juga melakukan pembangunan dari segi ekonomi yang maju melalui adanya tiga target yang akan dicapai yaitu melakukan peningkatan layanan yang sifatnya publik yang memiliki kualitas dan juga kuantitas yang penting, melakukan penciptaan daya kelola sumber daya yang tersedia di daerah secara efisien dan juga efektif, melakukan pemberdayaan dan juga penciptaan ruang publik yang lebih luas agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan adanya pembangunan (Mardiasmo, 2016:59).

Tujuan yang akan dicapai tentunya memerlukan keuangan yang dikelola oleh daerah seperti keuangan di desa yang perlu dikelola dengan baik. Desa mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai wujud didukung seperti dana berjenis perimbangan yang berasal dari pemerintah di pusat dan juga pemda sebesar 10 persen yang diberikan untuk desa dengan kata lainnya disebut dengan alokasi dana desa disingkat dengan ADD. Pemerintah yang ada di desa mendapatkan dan seperti ADD tujuannya yaitu sebagai bentuk dukungan dan juga memberikan dorongan untuk dilakukan kegiatan dengan menggunakan ADD dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan gotong royong sebagai bentuk dilakukan pemberdayaan.

Masyarakat yang diberdayakan dapat dimaknai sebagai suatu yang dapat dikatakan sebagai konsep dengan melakukan penekanan untuk membangun ekonomi yang awalnya dibangun atau dikembangkan sesuai nilai yang terdapat dalam masyarakat. Melalui konsep inilah yang nantinya memberi cerminan dari paradigma yang terbilang baru dengan penekanan masyarakat ikut berperan secara partisipasi dan dukungan sehingga bisa memfokuskan SDM yang dibangun. Setiap melakukan pembangunan dalam suatu bidang di pemerintah desa bahwa jalan alternatifnya dalam melakukan pembangunan yaitu melakukan pendekatan yang partisipatif dengan berparadigma nasional. Salah satu dari tindakan yang aktif yang nantinya diharuskan untuk dilakukan pada daerah yang menjadi target dengan tujuan peningkatan pendapatan disebut pembangunan dalam melakukan usaha.

Dengan melalui itulah, dibutuhkan partisipasi atau dalam mengambil peran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa termasuk pemerintah dan juga semua stakeholder yang akan ikut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung adanya pembangunan. Sehingga masyarakat nantinya akan memperoleh pendapatan yang terbilang meningkat karena sumber daya yang tersedia sebagai potensi dikelola dan diperbaiki serta dikembangkan dan mampu memberi kesejahteraan pada

masyarakat. Terdapat perda di kota malang dengan nomor 18 tahun 2006 tentang alokasi dana desa yang disingkat dengan ADD, ADD sebanyak 30 persen sesuai rincian yang digunakan untuk pemerintah di desa dengan penggunaannya mulai dari operasional dan tunjangan dan juga biaya dinas pemdes dalam melakukan perjalanan. Sebanyak tujuh puluh persen ADD yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dan juga kapasitas yang dikuatkan oleh pemdes. Dana yang sudah dirincikan diatas pemdes perlu mengelolanya yang bertujuan untuk saat melakukan pelaksanaan digunakan sesuai sasaran dari ADD dan juga memiliki kesesuaian dengan tujuan.

Penggambaran masyarakat dalam mengelola ADD di kantor pemdes landungsari kec. Dau, Kab. Malang. Permasalahannya masih banyak seperti melalui perencanaannya dan pelaksanaannya dan juga bentuk pelaporannya dan bentuk mempertanggung jawabkan keuangan yang ada di desa. Di tahap perencanaan dimana ADD digunakan lebih mengarah pada pelaksanaan dari program yang sudah dibuatkan oleh kepala desa bahwa disaat dilakukan musyawarah terkait pembangunan yang bersesuaian dan direncanakan atau disebut musrembang bahwa kehadiran masyarakat terkesan hanya untuk mendengar, sehingga melalui ini pendapat masyarakat tidak diberi ruang untuk memberi masukan atau sejenisnya.

Disaat membahas tahap-tahap pembangunan yang direncanakan menggunakan ADD, hanya terdapat beberapa orang pilihan yang diundang dan pembahasan dengan hasil pembangunan yang direncanakan menggunakan ADD bahwa informasinya tidak disampaikan atau disosialisasikan kepada semua masyarakat yang secara umum dan nantinya ketidaktahuan masyarakat terkait desa telah mendapat bantuan yang terbilang besar dari pemerintah di daerah dengan melalui adanya APBD yang memiliki implikasi terhadap masyarakat yang berpartisipasi terbilang apatis dengan adanya kegiatan yang telah dilakukan yang berasal dari ADD yang dikelola

oleh kepala desa dan keuangan yang dikelola oleh desa sesuai teknis dan juga bendahara yang terdapat di desa dengan harapan memahami dan juga mengerti cara mengelola ADD.

Berkaitan dengan penjelasan diatas bahwa telah terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi objek penelitian yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”.

1.2. ruang lingkup penelitian

Penelitian yang hanya berfokus dalam Proses Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.3. Rumusan Masalah

Melalui uraian permasalahan diatas dan yang menjadi rumusan dari masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dari pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa landungsari kecamatan dau kabupaten malang?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui realisasi pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa landungsari kecamatan dan kabupaten malang.

1.5. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian dapat bermanfaat untuk yang berkepentingan yaitu:

1. Sebagai bahan pemikiran terutama bagi pemerintah desa dan diharapkan bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan keuangan yang dikelola yaitu ADD.
2. Memiliki manfaat untuk penulis dengan cara memperluas pengetahuan serta wawasan di bidang pengelolaan keuangan alokasi dana yang disingkat dengan ADD dan juga di bidang dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan sebagai bentuk peningkatan kualitas akademik dalam hal ini ADD.

Yohana Lupu beti

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 publikasi.unitri.ac.id **11%**
Internet Source

2 repository.ub.ac.id **4%**
Internet Source

3 mulok.library.um.ac.id **3%**
Internet Source

4 repository.radenintan.ac.id **1%**
Internet Source

5 rinjani.unitri.ac.id **1%**
Internet Source

6 docplayer.info **1%**
Internet Source

7 Purban Dari, Rosalia Indriyati. "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA DLINGO KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL)", Jurnal Kewarganegaraan, 2020
Publication



id.123dok.com

Internet Source

1 %



jurnal.untan.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Yohana Lupu beti

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
